

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Allot, Antony, 1980, *The Limits of Law*, London, Butterworth.
- Arto, A Mukti, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Buaton, Tiarsen, 2016 “*Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*”, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta.
- Djamali, Abdoel. 2010, *Pengantar hukum Indonesia*, Raja Grafindo Presda, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Farid, Logemann dalam A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, cet. 1, Sinar Grafka, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hubungan Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam RUU KUHAP*, Vol. 2, *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*

*Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Kedua, Ghalia, Jakarta.

Heniarti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung

Hiariej, Eddy O.S, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang.

\_\_\_\_\_, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinarbaru, Bandung.

Manan, Bagir & Magnar, Kuntanan, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. 2, Universita Diponegoro, Semarang.

Mulyana, *et. al*, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Ngani, Nico, *et.al*. 1985, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3, Liberty, Yogyakarta.

Enny Nurbaningsih, 2022, *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*, Rajagrafindo Persada, Cetakan Kesatu, Depok.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 1999, *Pokok-Pokok Hasil*

*Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian  
Institusi Kejaksaan, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.*

Putra, Ardin Amandha, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan  
Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi*,  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*,  
ed. 1, cet. 2, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h  
Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Salam, Moch Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar  
Maju, Bandung.

Sianturi, 1995. *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Pidana Militer  
Indonesia*, Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Sihotang, Nia Sari, 2016, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya  
Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*,  
Pekanbaru.

Soesilo, R, 1991, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofyan, Andi & Asis, Abd, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.  
Prenada Media Group, Jakarta.

Sujono, Marsekal Muda TNI (Purn), 2023, *Peradilan Koneksitas:  
Problematika dan Prospektif*, Campustaka, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu  
Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan  
Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta.

Sumaryono, E, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat  
Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.

Warjiyati, Sri, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu  
Hukum*, Prenadamedia, Jakarta

Zainal, Amirudin dan Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal

- Dessy Debrilianawati, W., Saleh, C., & Hadi, M. "Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 2013.
- Hidayat, Nur, "Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004" *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Magtnra.
- Jurio, Faldi Ahmad, "Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkra Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi", *JOM Fakultas Hukum Univeritas Riau*, Vol. IV No. 2, Juli-Desember 2019.
- Lapae, Kelaesar Anna Hasanah, *et.al*, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas", *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 9, September 2022
- Mawarni, Yusnita, "Penetapan Tersangka Pada Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 2, Juli 2018.
- Sari, Okta Nofia *et. al*, "Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan", *Jurnal Hukum Welfare State*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2023.
- Sitompul, Christian Damero, 2012, "Implementasi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum USU*, Medan.
- Syamsuddin, Arwin, "Kajian tentang anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No. 6, Agustus 2017.
- Utrin, M., "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam Sistem Peradilan Pidana", Universitas Palembang, Volume 16, 2018.
- Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 2 2018.

Mawarni, Yusnita, "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.5 Issue 2, 2018.

### **C. Disertasi**

Azhari, Yulian, 2017, "Kompetensi Peradilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, Makasar.

Salidin, 2021, "Rekonstruksi Regulasi Lembaga dan Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Militer Berbasis Nilai Keadilan". *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang.

### **D. Tesis**

Bardi, Chrisvanly G, 2019, "Pemeriksaan Terpisah Dalam Perkara Koneksitas", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Hakim, Zulkarnain B, 2014, "Politik Penegakan Hukum pidana di Dalam Peradilan Militer", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

### **E. Makalah**

Sagala, Parluhutan & Ferdian, Fredy, 2016, "*Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuaasaan Kehakiman Di Indonesia*", Makalah yang disampaikan dalam rangka *Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS)*, Jakarta.

Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.

### **F. Hasil Penelitian**

Utami, Niken Subekti Budi dan Supriyadi, 2013, "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Laporan Hasil Penelitian*, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## G. Internet

CNN Indonesia, “Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni>

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Focus Group Discussion* (FGD) “Bidang Pidana Militer Kejati DIY”. [https://www.kejatidiy.go.id/focus\\_group\\_discussion\\_fgd\\_bidang\\_pidana\\_militer\\_kejati\\_diy\\_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05](https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05).

Nirmala Maulana Achmad, “Puspom TNI Merasa Tidak Dilibatkan Dalam Penetapan Tersangka Kepala Basarnas”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/10520751/puspom-tni-merasa-tidak-dilibatkan-dalam-penetapan-tersangka-kepala-basarnas>.

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, Direktori, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_jadwal\\_sidang/search/2/12/10/2022#](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#),

Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan *Focus Group Discussion* (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd-jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas>.

Wibowo, Kukuh S, “Kasus Suap PT PAL, Bekas Direktur Utama Firmansyah Arifin Diadili” <https://nasional.tempo.co/read/899802/kasus-suap-pt-pal-bekas-direktur-utama-firmansyah-arifin-diadili>

## H. Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara.

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak



## Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP/B/61/XII/1971 tentang Kebijaksanaan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata Dan Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.



Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor KEP.57.PR.09.03.Th 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Keputusan Bersama Nomor: 2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021 dan Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Keputusan Panglima TNI Nomor 200/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

#### **I. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-K/PMT-II/AL/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, 27 September 2012.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt Pst, 22 Pebruari 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015.